

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM OPEN DATA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SEMARANG

Tegar Pambudi  
NPP.29.0857

*Asdaf Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: 29.0857@praja.ipdn.ac.id

### **ABSTRACT (in english)**

**Problem/Background (GAP):** *The Open Data Program is a public service program whose management is under the authority of the Department of Communication, Information, and Statistics in providing information disclosure services to the public. One of these programs is also implemented in Semarang Regency based on Regent Regulation No. 66 of 2020. Objectives:* This study aims to find out how the implementation of Open Data program policies in providing information in Semarang Regency. **Methods:** *This study used a descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Results/Findings:* The results of the study show that the implementation of Open Data still encounters several shortcomings, including the absence of Regional Regulations governing Open Data, delays in data input, sectoral egos, employee mutations, and not all information is available on the website. **Conclusion:** *It is known that the management of the Open Data program held in Semarang Regency has not been running well.*

**Keywords:** *Open Data Program, Policy Implementation, Inhibiting Factors and Efforts*

### **ABSTRAK (in bahasa)**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Program *Open Data* adalah suatu program pelayanan publik yang pengelolaannya berada di bawah wewenang Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika dalam memberikan layanan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Salah satu program tersebut juga dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2020. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program *Open Data* dalam memberikan informasi di Kabupaten Semarang. **Metode:** Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan *Open Data* masih menemui beberapa kekurangan antara lain belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur *Open Data*, Keterlambatan dalam *input* data, adanya ego sektoral, adanya mutasi pegawai, dan belum semua informasi terdapat dalam *website*. **Kesimpulan:** Diketahui bahwa pengelolaan program *Open Data* yang diselenggarakan di Kabupaten Semarang belum berjalan dengan baik.

**Kata Kunci : Program *Open Data*, Implementasi Kebijakan , Faktor Penghambat dan Upaya**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam suatu pemerintahan, data merupakan hal yang dibutuhkan dan memiliki fungsi. Data dapat memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta evaluasi dalam suatu kegiatan pemerintahan. Kegiatan pelaksanaan penyajian data yang dilakukan oleh Badan Publik terkait akan menjadi informasi bagi masyarakat harus dilakukan secara baik. Data merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan suatu kebijakan dan perencanaan pembangunan di suatu negara (Maizunati, 2018). Data yang disajikan kepada masyarakat nantinya harus valid agar tidak terjadi penyimpangan informasi. Hal ini juga upaya pemerintah untuk menjalankan tugas dengan prinsip transparansi.

Perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan membuat pemerintah untuk memberi pelayanan yang memudahkan Revolusi industri 4.0 menyebabkan perusahaan dan instansi di seluruh dunia menggunakan media elektronik sebagai alat untuk beroperasi teknologi informasi dan komunikasi semakin mempermudah bisnis proses organisasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan pelayanan, termasuk dalam hal keterbukaan informasi publik. Salah satu kegiatan pemerintah yaitu mengolah data untuk selanjutnya diteruskan berupa informasi publik.

Karena disetiap daerah yang maju pastinya memiliki pemerintah yang melek dalam teknologi sehingga setiap pemerintah daerah berusaha menjadi daerah serba canggih. Pemerintah Kabupaten Semarang telah membentuk portal website portal *Open Data* untuk melaksanakan pelayanan informasi berbasis elektronik.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media elektronik demi mewujudkan good governance. Pemerintah Kabupaten Semarang menjalankan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi mewajibkan pemerintahan diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi portal website sebagai program *Open Data* untuk melaksanakan pelayanan informasi berbasis elektronik, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik. Website tersebut telah berdiri pada tahun 2019. Data dan Statistik tersebut nantinya juga dapat dilihat pada website Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Semarang.

Diskominfo bertanggung jawab atas validasi dan keakuratan data data yang tersebut. Website ini dapat diakses oleh lapisan masyarakat melalui alamat <https://statistik.semarangkab.go.id>. Website tersebut juga telah terintegrasi dengan portal *Open Data* Kabupaten Semarang. Pengguna elektronik atau khalayak masyarakat dapat mengakses Statistika Sektoral, dengan membuka alamat resmi Kabupaten Semarang yaitu <https://semarangkab.go.id>. Implementasi *Open Data* juga termasuk dalam syarat terlaksananya *Smart Government*.

Penerapan *Smart Government* di Kabupaten Semarang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik dengan memanfaatkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati – hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Open data Kabupaten Semarang dijadikan sebagai pusat informasi resmi pemerintahan yang terbuka dan dimanfaatkan oleh siapapun baik organisasi pemerintah maupun masyarakat. Program *Open Data* dilaksanakan untuk memberikan pelayanan data secara terbuka dan akuntabel. Selain itu masyarakat akan lebih mudah mengakses data yang valid dan dapat dipercaya. Masyarakat dapat mendapatkan data resmi dan terpercaya, sehingga untuk menjadi pegangan dan pembandingan apabila terdapat informasi lain yang berasal dari sumber-sumber tidak resmi.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dalam kegiatan keterbukaan informasi ini masih didapati kekurangan yang hal harus diperbaiki oleh pengelola website. Masalah pertama adalah terbatasnya data. Pada bagian data dasar masih terdapat data yang kurang lengkap dari tahun ke tahun. Kedua adalah seluruh OPD tidak melakukan perubahan data sesuai informasi terkini yang ada di Kabupaten Semarang. Padahal semua OPD sudah tersambung dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Semarang. Ketiga adalah tidak tersedianya data beberapa komponen *website*. Pada bagian Publikasi dan Peta hanya ditampilkan penjelasan definisi publikasi dan peta.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian Susy Ella (2020) yang berjudul Pemanfaatan *E-Goverment* dalam Menjawab Tantangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menemukan bahwa Badan Publik menerapkan

*e-government* berbasis *website* yang menjadikan tidak adanya batas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Informasi juga bisa didapatkan dengan cepat, mudah, dan gratis. Selain itu juga mendukung Badan Publik untuk transparan terhadap kinerjanya sehingga meminimalisir adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang memberikan dampak bagi negara. Kedua, penelitian Aty Kumawaty, dkk (2019) yang berjudul *Pemodelan Data Center untuk Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis TIK di Pemerintah Kota Bandung*. Yang menemukan bahwa Pemerintah Kota Bandung membentuk integrasi data dan sistem yang dilakukan dengan cara membangun infrastruktur TIK melalui *data center* dan portal data terpadu. Sarana dan prasarana TIK milik seluruh OPD menggunakan aliran aktifitas perancangan Infrastruktur. *Data center* mengacu pada standar *Telecommunication Industry Association*. Ketiga, penelitian Nur Afizah Maizunati (2018) yang berjudul *Implementasi Data Sektor Terbuka Dalam Mendukung Smart Governance di Kota Magelang*. Menemukan bahwa Dengan kemudahan akses informasi publik melalui portal statistik sektoral dan ketersediaannya dalam format data yang bersifat terbuka dapat memberikan keuntungan dalam hal pembangunan daerah. Keterbukaan informasi publik dapat mempermudah publik melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintahan, menghindari tindak korupsi, memperluas diseminasi penelitian, mempermudah penelitian dan memajukan perekonomian digital.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda. Sementara itu penelitian ini menyoroti mengenai implementasi program *Open Data* yang ada di Kabupaten Semarang. Lokus penelitian ini terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Semarang selaku *leading sector* penyedia layanan portal data terpadu di Kabupaten Semarang.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program *Open Data* dalam memberikan informasi di Kabupaten Semarang.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Creswell, 2016:3). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Semarang (1 orang), Kepala Bidang Persandian dan Statistik (1 orang), Kepala Seksi Persandian (1

orang), Kepala Seksi Statistik (1 orang), Staf admin *Open Data* di Diskominfo (1 orang), Operator program *Open Data* (1 orang), Masyarakat Pengguna *Open Data* (2 orang), Pegawai admin *Open Data* di OPD (2 orang). Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dibahas dengan menggunakan teori George Edward III dengan dimensi Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Faktor Pendukung Meningkatnya Partisipasi Pilkada Kabupaten Bantul 2020 di Masa Pandemi Covid-19

Peneliti dalam menganalisis program *Open Data* menggunakan teori George Edward III dengan dimensi Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

##### A. Komunikasi

- Transmisi

Transmisi menyangkut tentang pemahaman pelaksana kebijakan terhadap penyampaian informasi mengenai kebijakan yang ditetapkan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman tentang kebijakan tersebut. Transmisi terkait dengan kebijakan program *Open Data* ini dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan OPD pengelola *Open Data*. Penjelasan mengenai sosialisasi *Open Data* kepada OPD pengelola *Open Data* yang dilaksanakan secara rutin minimal tiga kali setahun untuk *desk* data dan selalu dilakukan bimbingan teknis pada awal tahun. Manfaat sosialisasi pada awal tahun untuk operator lama adalah adanya *sharing* informasi mengenai *Open Data*. Untuk transmisi kepada masyarakat sudah dilaksanakan sosialisasi melalui media sosial milik Diskominfo, mengundang masyarakat atau masuk ke dalam acara tertentu, adanya brosur mengenai *Open Data*, dan *Open Data* sudah pernah masuk ke dalam koran harian Kabupaten Semarang. Namun indikator transmisi pada teori Edward III ini tidak sepenuhnya berhasil karena tidak semua masyarakat telah mengetahui program *Open Data*.

- Kejelasan

Kejelasan dalam program *Open Data* sendiri telah dicantumkan dalam peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020. Namun belum ada peraturan daerah yang membahas program *Open Data*. Untuk Peraturan Bupati Nomor tersebut sudah jelas dan dapat diunduh pada portal *Open Data* oleh seluruh masyarakat atau OPD yang membutuhkan. kejelasannya sudah baik karena aktivitas *Open Data* telah mempunyai pedoman yang jelas juga seperti Peraturan Bupati dan SOP dalam menjalankan aktivitasnya. Selain pada pedoman penggunaan *Open Data*, kejelasan juga diperkuat dengan aplikasi yang *user friendly* artinya mudah dipelajari dan digunakan oleh admin baru. Apabila pengelola *Open Data* pada OPD mengalami kebingungan atau keluhan dapat menghubungi staf Diskominfo sehingga mendapatkan respon yang cepat.

- **Konsistensi**

Konsistensi menyangkut tentang kepastian perintah. Perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh saling bertentangan. Konsistensi diperlukan agar program yang ditetapkan tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dibuktikan dengan perintah plt. kepala dinas yang dinilai sudah jelas oleh staf Diskominfo dan perintah tersebut tetap didiskusikan kembali oleh staf karena membutuhkan pengembangan dalam melaksanakan perintah tersebut. *Open Data* juga sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada karena di dalam petunjuk sudah tertera daftar pengumpulan, penyusunan, dan pelaporan data yang sudah terjadwal dan sampai saat ini implementasinya sudah sesuai dengan petunjuk.

## **B. Sumber Daya**

- **Staf**

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya telah terdapat tiga staf dalam tugas mengoperatorkan *Open Data* tanpa operator khusus yang ahli dalam tugas ini. Namun masih terdapat kekurangan pada kualitas dan kuantitas staf. Untuk kualitas masih kurang pada staf yang dapat bekerja dalam hal desain grafis secara khusus. Untuk kuantitas yaitu staf yang menangani *Open Data* di Diskominfo masih sedikit yaitu tiga staf. Dari tiga staf tersebut terdapat masih menjalani cuti melahirkan pada bulan Desember 2021. Oleh karena itu staf pengelola di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dinilai kurang. Namun hal ini juga disebabkan karena kurangnya jumlah SDM yang memadai sehingga muncul kebijakan pengadaan pegawai non – ASN. Sedangkan untuk penempatan staf juga sudah baik karena staf yang ditunjuk mampu mengelola *Open Data* dengan baik.

- **Wewenang**

*Open Data* yang telah mengimplementasikan wewenang dengan jelas berdasarkan SOP dan peraturan, setiap staf sudah memahami dan mampu melaksanakan wewenangnya masing – masing dengan baik dan koordinasi wewenang antar staf juga sudah baik dibuktikan dengan selalu diadakannya rapat atau adanya grup *WhatsApp*. Pada implementasinya setiap pelaksana atau tim *Open Data* telah melakukan wewenang dan tugasnya sesuai dengan Perwal tersebut dengan baik.

- **Informasi**

Dalam implementasi program *Open Data* sudah sesuai dengan teori Edward III seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Informasi dalam *Open Data* dinilai sudah baik karena memberikan berbagai macam informasi yang valid dan disusun secara sistematis. Dari berbagai macam informasi yang ada telah memberikan banyak manfaat. Informasi yang diberikan *Open Data* juga dinilai masyarakat sudah baik karena memberikan data yang jelas dan lengkap.

- **Fasilitas**

Implementasi kebijakan program *Open Data* yang terjadi pada indikator fasilitas adalah sudah terdukungnya *Open Data* dengan cukup baik seperti perangkat pengelola data, akses jaringan, dan dana. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki yaitu kedisiplinan admin data pada tiap OPD, tambahan SDM untuk mengelola data khususnya pada bidang desain grafis, dan diharapkan adanya sistem integrasi.

### **C. Disposisi**

- **Komitmen**

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan terkait program *Open Data*, sekretaris dinas, kepala bidang persandian dan statistik, dan kepala seksi bidang statistik mempunyai komitmen yang konsisten. Pelaksana kebijakan mempunyai komitmen agar program *Open Data* selalu memberikan data yang akurat dan terbuka. Pelaksana kebijakan juga berkomitmen agar setiap OPD yang berkaitan dengan program *Open Data* selalu memberikan data dengan tepat waktu.

- **Insentif**

Pada implementasi program *Open Data* telah sesuai dengan teori ini karena insentif selalu diberikan kepada pengelola program di Diskominfo atau OPD dan instansi vertikal terkait dan pemberian insentif ini telah didasari dengan SK Bupati sehingga pemberian insentif perbulan dilakukan rutin saat rapat triwulan. Dengan adanya pemberian insentif maka kinerja pengelola *Open Data* menjadi lebih optimal.

### **D. Struktur Birokrasi**

Secara umum struktur birokrasi merupakan suatu bagian yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, fasilitas pendukung, wewenang, dan sebagainya. Apabila struktur organisasi tidak kondusif maka akan menghambat jalannya suatu kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara dan pelaksana implementasi kebijakan publik. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan prosedur dalam (internal) organisasi yang berisi standar – standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan. SOP mempunyai manfaat bagi sebuah organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi dibutuhkan prosedur tetap berupa SOP yang akan digunakan untuk menggerakkan suatu kelompok, karena dalam SOP terdapat petunjuk teknis untuk mencapai tujuan. Namun SOP bisa juga sebagai penghambat apabila terdapat kebijakan baru dan belum diketahui dengan baik oleh kelompok pelaksana kebijakan atau program.

### **3.2. Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Program *Open Data* Pemerintahan di Kabupaten Semarang**

#### **A. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat**

Sosialisasi kepada masyarakat yang kurang aktif menyebabkan pemahaman masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data dan informasi menjadi berkurang. Pada penelitian ini sosialisasi memang sudah dilaksanakan seperti disiarkan dalam radio, media sosial, dan brosur. Namun hal tersebut dirasa kurang karena masih terdapat masyarakat umum yang belum mengetahui adanya program *Open Data*.

#### **B. Peraturan Daerah belum ada**

*Open Data* telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Semarang namun belum ada payung hukum berupa peraturan daerah yang mengatur tentang masalah *Open Data* ini. Peraturan daerah merupakan salah satu peraturan perundang – undangan sehingga memiliki sifat memaksa dan mengikat umum. Dengan adanya sifat tersebut maka peraturan daerah tersebut wajib dijalankan oleh pihak terkait yang disebutkan dalam peraturan daerah. Hal tersebutlah yang menyebabkan peraturan daerah penting untuk mendasari sebuah kebijakan dari pemerintah. Belum adanya peraturan daerah mengenai *Open Data* ini menyebabkan kebijakan *Open Data* tersebut masih dianggap lemah.

#### **C. Keterlambatan pengelolaan data dalam input data**

Masih ada admin *Open Data* di OPD yang terlambat untuk menginput data. Hal ini disebabkan karena tugas mereka tidak hanya sebagai admin data pada program *Open Data* namun juga tugas masing – masing di OPD. Diskominfo sudah memberikan *deadline* pengumpulan data jadi seharusnya setiap admin dapat menyesuaikan hal tersebut dan meminimalisir adanya keterlambatan pengumpulan data. Sampai sekarang hukuman untuk keterlambatan hanya berupa teguran secara personal, teguran melalui grup *WhatsApp*, dan teguran kepada kepala OPD yang terkait. Hukuman yang kurang tegas menyebabkan keterlambatan masih terjadi pada admin di OPD.

#### **D. Belum ada ruang khusus dan integrasi sistem**

Dalam mengelola *Open Data* membutuhkan ruangan khusus karena pengelolaan berkaitan dengan kerumitan data dan angka berbagai macam OPD. Saat ini ruangan untuk mengelola *Open Data* bergabung dengan staf Diskominfo yang lain. Hambatan selanjutnya adalah belum terbentuknya integrasi sistem. Integrasi sistem dibutuhkan untuk mengurangi *double input data*. Dalam melakukan integrasi membutuhkan ruang bernama *command center*. Untuk membangun *command center* membutuhkan banyak fasilitas seperti *server*, modul, dan SDM yang mumpuni. Persiapan integrasi membutuhkan persiapan yang matang agar nantinya dapat terlaksana sesuai tujuan.

#### **E. Adanya mutasi pegawai pada beberapa OPD**

Terdapat juga hambatan pada admin di OPD karena adanya sistem mutasi yang menyebabkan pengelola *Open Data* di suatu OPD dimutasikan ke OPD lain sehingga pengelola OPD harus

digantikan oleh orang lain. Pengelolaan data menjadi terhambat karena pengelola data otomatis akan digantikan oleh pengelola yang baru. Pengelola *Open Data* yang baru tersebut masih harus mempelajari cara mengelola data dari awal seperti pengumpulan data, verifikasi data, dan *input* data yang dilakukan secara *online*.

#### **F. Belum semua informasi terdapat dalam program *Open Data*.**

Pada program *Open Data* sudah terdapat berbagai macam informasi namun masih ada informasi yang belum *terinput* pada program ini, contohnya informasi ketahanan pangan, penataan ruang, pekerjaan umum, dan pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi masyarakat. Informasi dan data tersebut masih harus dilengkapi kembali agar lebih lengkap lagi.

### **3.3. Upaya yang Dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam Implementasi Kebijakan Program *Open Data* Pemerintahan di Kabupaten Semarang**

#### **A. Melakukan Sosialisasi secara langsung dan terjadwal**

Program *Open Data* telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa macam media seperti internet dan brosur. Namun masih saja dirasa kurang. Upaya yang dilakukan oleh Diskominfo yaitu melakukan sosialisasi mengenai keterbukaan data di Kabupaten Semarang. Sosialisasi ini diharapkan lebih efektif karena sosialisasi ini dilakukan secara langsung kepada mahasiswa agar mahasiswa mengerti pentingnya statistik dan informasi data sektoral mengenai daerahnya sendiri. Pada sosialisasi tersebut mahasiswa dapat mendapat manfaat untuk proses pembelajaran mereka yang berkaitan dengan data Kabupaten Semarang.

#### **B. Dibentuknya Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah sudah dirancang sejak tahun 2019. Peraturan Daerah ini memiliki judul rancangannya yaitu satu data informasi pemerintahan daerah dan direncanakan akan dikeluarkan pada tahun 2022. Saat ini rancangan Peraturan Daerah sudah ada namun masih dalam tahap review dan menunggu persetujuan serta penandatanganan dari bupati.

#### **C. Adanya teguran, dibentuknya aturan hukuman pada Peraturan Daerah dan rutinnnya pemberian insentif**

Terdapat beberapa macam teguran yang diberikan oleh pengelola *Open Data* di Diskominfo. Teguran pertama disampaikan secara personal kepada pengelola OPD yang bersangkutan. Teguran selanjutnya disampaikan di grup pengelola *Open Data*. Apabila masih terlambat mengumpulkan data maka teguran dibuat secara tertulis dan disampaikan pada kepala OPD terkait. Aturan untuk hukuman belum tercantum pada Peraturan Bupati sehingga saat ini sedang direncanakan akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah yang akan dikeluarkan pada tahun ini.

Insentif berupa honorarium perbulan diberikan setiap triwulan pada saat rapat triwulan dilaksanakan.

#### **D. Membangun ruangan khusus dan integrasi sistem**

Saat ini sudah tersedia ruangan untuk proses pengelolaan program *Open Data* dan hanya kurang fasilitas pelengkap untuk mengisi ruangan tersebut dan membentuk suatu integrasi sistem. Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Rencana anggaran ini diajukan kepada Bupati untuk diproses apabila disetujui oleh Bupati.

#### **E. Adanya pelaksanaan *desk data* secara rutin agar pengelola baru tiap OPD mudah menyesuaikan**

Saat ini sudah tersedia ruangan untuk proses pengelolaan program *Open Data* dan hanya kurang fasilitas pelengkap untuk mengisi ruangan tersebut dan membentuk suatu integrasi sistem.

#### **F. Terdapat kotak saran atau permintaan data terhadap informasi yang belum tersedia**

Pada program *Open Data* belum semua informasi telah tersedia sehingga disediakan kotak saran atau permintaan data. Masyarakat dapat mengirimkan pesannya untuk meminta data yang diinginkan. Permintaan data tersebut akan direspon langsung oleh staf *Open Data* di Diskominfo dengan cepat. Admin di OPD juga dapat memberikan sarannya mengenai data yang layak untuk dipublikasikan. Saran dari OPD ini dapat disampaikan dan dimusyawarahkan saat rapat triwulan yang rutin dilaksanakan.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peneliti menemukan bahwa program *Open Data* di Kabupaten Semarang bertujuan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat terkait program, kebijakan dan data pemerintahan. Program tersebut dilaksanakan melalui sebuah sistem yang tertata. Layaknya temuan Aty Kusumawaty, dkk (2019) yang menemukan bahwa Pemerintah Kota Bandung membentuk integrasi data dan sistem yang dilakukan dengan cara membangun infrastruktur TIK melalui *data center* dan portal data terpadu (Kusumawaty et al., 2020)

Diketahui bahwa program *Open Data* bertujuan untuk meminimalisir terjadinya KKN karena adanya keterbukaan dari pemerintah. Layaknya temuan Susy Ella (2020) yang menemukan bahwa selain itu juga mendukung Badan Publik untuk transparan terhadap kinerjanya sehingga meminimalisir adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang memberikan dampak bagi negara (Ella, 2020).

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan program *Open Data* secara umum sudah terlaksana dengan baik namun masih kurang optimal karena masih ditemukannya penghambat yakni Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Peraturan Daerah belum ada, Keterlambatan pengelola data dalam *input* data, Adanya ego sektoral pada beberapa OPD, Adanya mutasi pegawai pada beberapa OPD, Belum semua informasi terdapat dalam program *Open Data*. Dengan upaya yang dilakukan yakni Melakukan sosialisasi secara

langsung dan terjadwal, Adanya teguran, dibentuknya aturan hukuman pada Peraturan Daerah dan rutinnnya pemberian insentif, Meningkatkan koordinasi dengan tiap OPD untuk rutin menginput pembaruan data, Adanya SOP *user friendly* dan rutinnnya pelaksanaan *desk* data agar pengelola baru OPD mudah menyesuaikan, Terdapat kotak saran atau permintaan data terhadap informasi yang belum tersedia.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan *Open Data* di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah..

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Semarang beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT. Pustaka Pelajar.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593/pdf>
- Penelitian, P., Pengabdian, D. A. N., & Stis, P. S. (2018). *Laporan Penelitian Dosen Studi Penerapan Linked Open Data Untuk Diseminasi Data Official Statistics*.
- Putri, M. W., & Mutiah, N. (2021). PENGUKURAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN OPEN DATA SYSTEM MENGGUNAKAN MODEL DELONE AND MCLEAN (Studi Kasus : Open Data System Pemerintah Kota Pontianak). *Jurnal Komputer Dan Aplikasi*, 09(01), 12–22.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. 1–12.
- Suckling, G. W., & Pearce, E. I. (1984). Developmental defects of enamel in a group of New Zealand children: their prevalence and some associated etiological factors. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 12(3), 177–184. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.1984.tb01434.x>